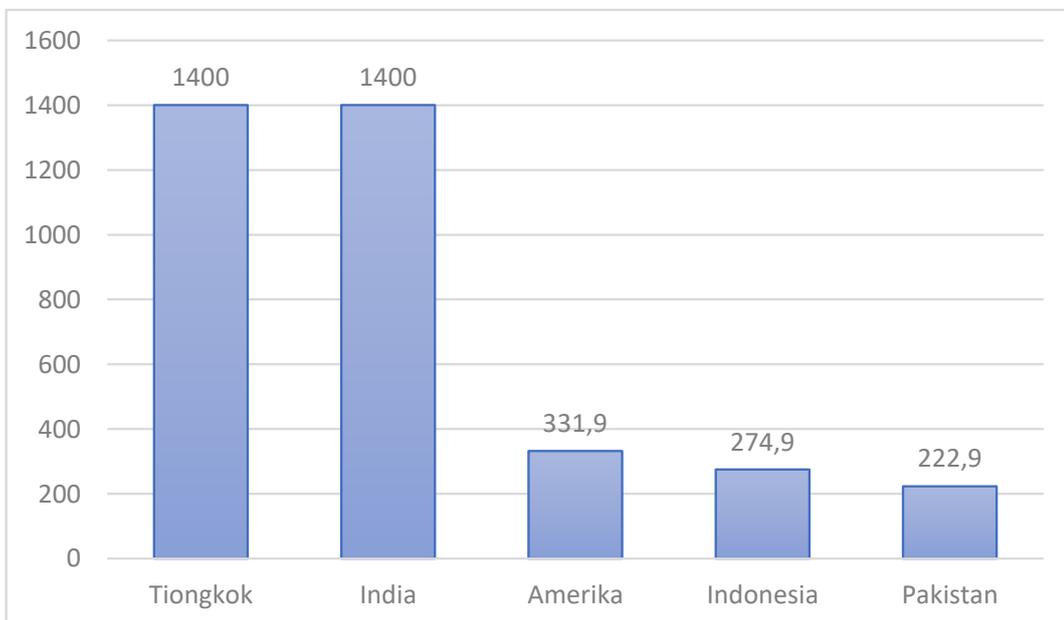


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya di anjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja, namun juga harus mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Agustina dkk, 2018).



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Gambar 1.1

Data Peringkat 5 Teratas Jumlah Penduduk Dunia (2020)

Indonesia merupakan negara dengan peringkat 4 penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 274,86 juta jiwa dimana Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan jumlah 1,4 miliar lebih penduduk, kemudian India di peringkat dua dengan jumlah 1,4 miliar lebih juga, dan ketiga adalah Amerika dengan jumlah 331,9 juta penduduk. Penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami peningkatan dan juga tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja baru dapat menimbulkan pengangguran.

Menurut Sukirno, (2008) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong bahkan penghambat suatu pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penghambat. Dalam hal ini jumlah penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak terserap oleh unit usaha atau dunia kerja yang mengakibatkan seseorang mejadi pengangguran (Pramudsaji dkk, 2019).

Adapun dalam perspektif Islam menjelaskan mengenai pengangguran dijelaskan dalam Qs. Alam Nasyrah ayat 7-8:

(8) فَأَرْغَبُ رَبِّكَ وَإِلَى (7) فَأَنْصَبُ فَرَّغْتَ فَأَادَا

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q. S. Al-Insyirah [94]: 7-8)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya (Cahaya, 2015).

Tabel 1.1

Data Tingkat Pengangguran Terbuka 5 Provinsi di Indonesia (%)

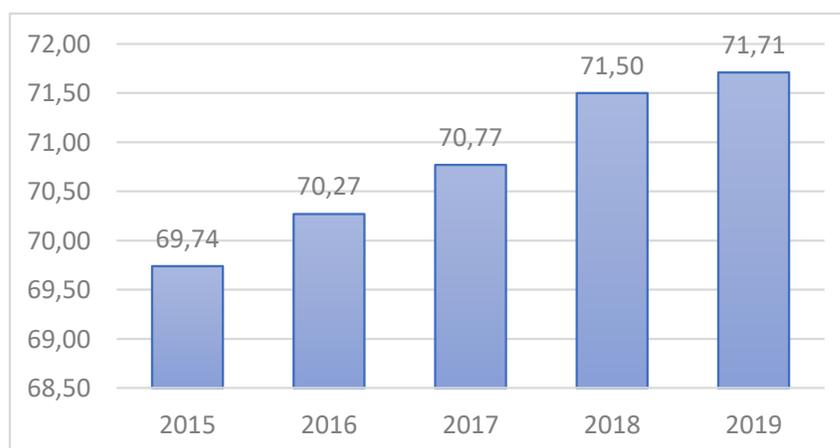
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Timur	4.47	4.21	4.00	3.91	3.82
DKI Jakarta	7.23	6.12	7.14	6.65	6.54
DIY	4.07	2.72	3.02	3.37	3.18
Jawa Tengah	4.99	4.63	4.57	4.47	4.44
Jawa barat	8.72	8.89	8.22	8.23	8.04

Sumber: BPS data diolah.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran terbuka yang selanjutnya akan disebut TPT memiliki tren yang menurun setiap tahunnya dari 4.47% pada 2015 menjadi 3.82% pada tahun 2019. Untuk provinsi lainnya semuanya mengalami TPT yang yang fluktuatif. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik dikarenakan Jawa Timur dapat dengan konstan memiliki tren yang menurun selama periode 2015-2019. Jumlah penduduk setiap tahunnya pasti bertambah, maka angkatan kerja pun akan ikut bertambah, oleh karena itu lapangan perkerjaan harus terus ikut bertambah untuk mengimbangi angkatan kerja. Tetapi, meskipun TPT ini memiliki tren yang

menurun Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama kemiskinan di provinsi di Indonesia (Yosepha, 2021). Hal ini tentu menghawatirkan, dengan tingginya kemiskinan dapat membuat rentan menambah pengangguran karena menurut teori lingkaran setan Ragnar Nurkse (1953) kemiskinan muncul salah satunya dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan begitupun sebaliknya. Sehingga tentu saja tren penurunan TPT tersebut harus dilanjutkan demi meminimalisir tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur.

Akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). (UNDP : 1996). Menurut Arizal dan Marwan (2019) Komponen IPM seperti pencapaian kualitas pendidikan, kualitas akses pelayanan kesehatan dan kualitas hidup sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang akan bekerja di wilayah tersebut, terlepas dari baik kualitasnya, workability juga akan meningkat..



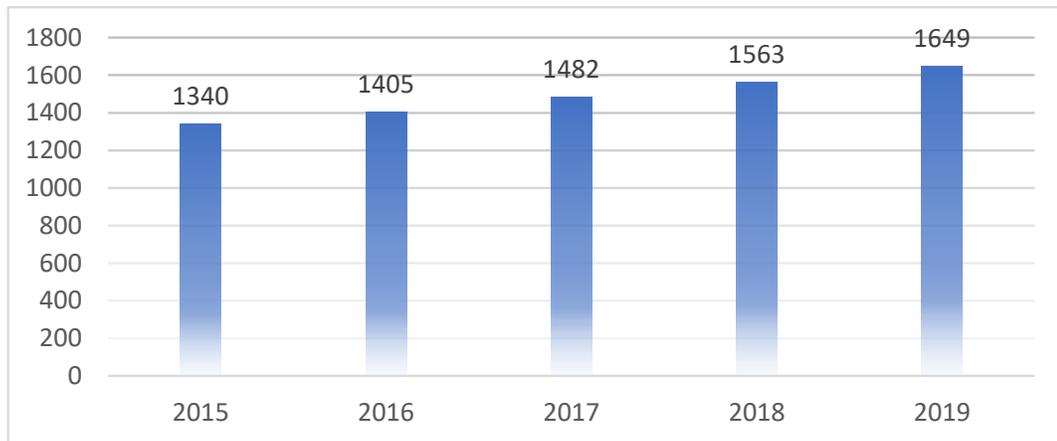
Sumber: BPS data diolah.

Gambar 1.2

Data IPM Jawa Timur 2015-2019

Berdasarkan data diatas, IPM di Jawa Timur memiliki tren positif yaitu terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 69.74 poin menjadi 71.71 poin pada tahun 2019. Peningkatan pembangunan manusia melalui pengembangan sumber daya manusia, yang diwujudkan dalam tingkat pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan sumber daya manusia, lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. (Ariza dan Marwan, 2019).

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Sukmaraga, 2011). PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS data diolah.

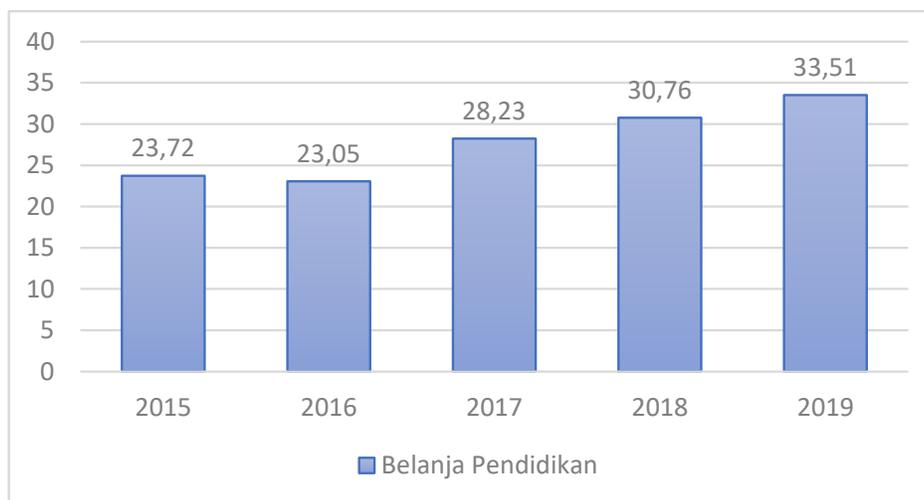
Gambar 1.3

Data PDRB Jawa Timur tahun 2015-2018 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran

Berdasarkan data diatas, PDRB Jawa Timur terus mengalami kenaikan yang awalnya 1340 Triliun pada 2015 menjadi 1649 Triliun pada 2019. Menurut Parwata dkk (2016) dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta (pengangguran menurun) serta dapat mengurangi angka kemiskinan.

Pendidikan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2003). Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang akan mengolah

kekayaan alam, barang modal dan investasi di sektor produktif seperti pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan dan baru-baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*). Dengan kata lain maka dengan meningkatnya kualitas seseorang, maka akan semakin menurun kemungkinannya untuk menganggur. Tetapi dalam kehidupan nyata tidak semua masyarakat dapat mendapatkan pendidikan, ada beberapa kalangan yang hanya dapat mendapatkan Pendidikan dibawah standar minimal Pendidikan di Indonesia yaitu minimal 12 tahun. Oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan bantuan dan dengan sekaligus untuk meningkatkan Pendidikan pemerintah mengeluarkan belanja untuk Pendidikan.



Sumber: Kemdikbud

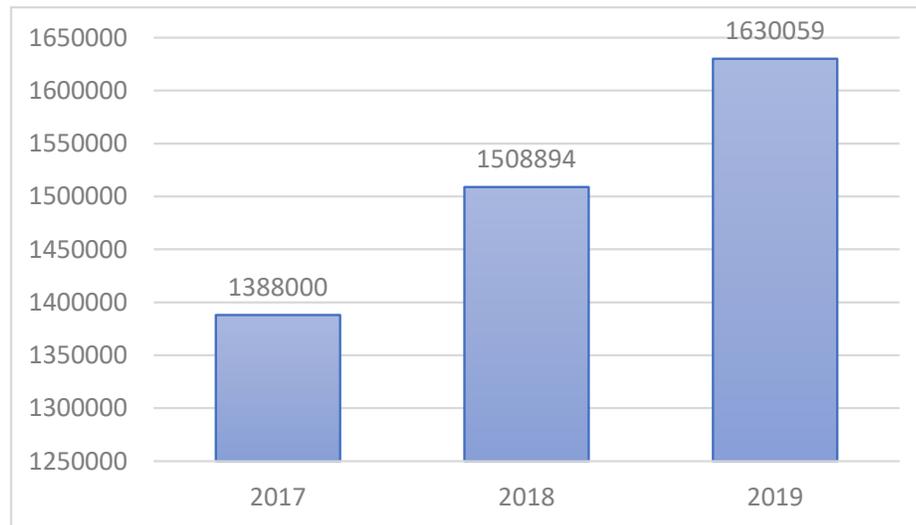
Gambar 1.4

Data Belanja Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019

Pendidikan sangatlah penting, maka pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada bidang pendidikan. Pada saat pendidikan setiap orang tercukupi menurut standard indonesia yaitu 12 tahun, maka akan meningkatkan kualitas hidupnya ke tingkat standar secara teori karena banyak juga faktor atau ilmu dan keahlian yang bisa dipelajari juga diluar pendidikan formal. Oleh karena hal tersebut dapat dilihat bahwa *overall* belanja pendidikan pemerintah setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa belanja Pendidikan Provinsi Jawa Timur berfluktuatif meskipun hanya dalam waktu satu tahun, yaitu berawal pada tahun 2015 sebesar 23,72 ribu miliar menurun menjadi 23,05 ribu miliar dan seterusnya meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi 33.51 ribu miliar.

Menurut Kaufman dan Hotchkis dalam Hartanto dan Masjkuri (2017) dijelaskan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Selain itu, Mankiw (2003: 156) juga menjelaskan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran salah satunya yaitu kekakuan upah (*wage rigidity*) atau gagalnya upah dimana pada penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Perusahaan yang menetapkan upah minimum lebih rendah maka akan mendorong lebih banyak tenaga kerja. Keynes

menulis pada bukunya “*The General Theory*” bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah turun (Mankiw, 2003: 343).



Sumber: Bapedda Jatim

Gambar 1.5

Data UMP Provinsi Jawa Timur 2017-2019

UMR Jawa Timur memiliki tren yang positif yaitu terus meningkat setiap tahunnya, diawali pada tahun 2017 dengan umr sebesar Rp 1.388.000 hingga pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.530.059.

Keempat variabel diatas telah digunakan dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya oleh Arizal dan Marwan (2019) menggunakan variabel IPM dengan hasil positif dan signifikan terhadap pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia pencapaiannya dapat diukur berdasarkan beberapa elemen dasar kualitas hidup. (BPS, 2019). Dengan meningkatnya IPM maka kualitas seorang pun akan meningkat dan dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk

mendapat kualifikasi untuk bekerja. Variabel PDRB digunakan oleh Silaban, dkk (2020) dengan hasil pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Menurut Sukmaraga (2011) dalam Silaban, dkk (2020) PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode. PDRB dapat berpengaruh pada jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja jika nilai PDRB meningkat, maka seluruh unit ekonomi di suatu wilayah nilai barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan tersebut yang akan menyebabkan kenaikan jumlah tenaga kerja yang diminta.

Variabel belanja pendidikan digunakan oleh Mardiana, dkk (2017) dengan hasil negatif dan tidak signifikan. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing salah satunya dengan pendidikan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah memiliki anggaran sendiri untuk pendidikan sebagai peningkatan kualitas seorang. Dengan meningkatnya kualitas seorang maka kesempatan ia untuk bekerja pun akan ikut meningkat.

Variabel yang terakhir adalah upah yang digunakan oleh Al Umar, dkk (2020) dengan hasil negatif dan tidak signifikan. Hukum keseimbangan pasar dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkat keseimbangan antara upah dan jumlah tenaga kerja berlaku pada hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketika upah dapat meningkat maka efektifitas hukum ini akan berjalan. Maka tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan akan bertambah, maka pengangguran akan menurun. Demikian pula sebaliknya jika tingkat pengangguran bertambah, tingkat upah diturunkan, maka

permintaan tenaga kerja bagi perusahaan akan menurun, sementara tingkat penawaran akan berkurang. Para tenaga kerja mendapatkan tempat di perusahaan dan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin berkurang (Basmar dan Sugeng, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh IPM, PDRB, Belanja Sektor Pendidikan Dan UMK Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, permasalahan utama yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh belanja Pemerintah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh UMK terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

5. Bagaimana pengaruh IPM, PDRB, belanja Pemerintah, dan UMK secara bersama sama terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh IPM terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
2. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
3. Mengetahui pengaruh belanja Pemerintah terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
4. Mengetahui pengaruh UMK terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.
5. Mengetahui pengaruh IPM, PDRB, belanja Pemerintah, dan UMK secara bersama sama terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi perkembangan ilmu ekonomi terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi pengangguran.

2. Praktis.

a. Bagi Pemangku Kebijakan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan mengenai penanganan atau kebijakan pengangguran.

b. Bagi Masyarakat.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih bijak untuk mengambil langkah saat memertimbangkan suatu keputusan yang berkaitan pada pemilihan produk pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi Akademisi.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai factor-faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran disuatu wilayah dan dapat dijadikan sebagai referensi serta perbandingan pada penelitian selanjutnya

d. Bagi Penulis.

Tentu diharapkan penelitian ini bisa untuk meningkatkan proses belajar dan menambah wawasan. Dapat menerapkan teori-teori yang sudah

dipelajari pada penelitian ini agar dapat diaplikasikan pada permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata.